

PARTISIPASI PEMILIH MENJELANG PEMILU 2014

Dewi Sendhikasari D.^{*)}



Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia akan digelar kembali pada tahun 2014 mendatang. Berbagai persiapan dilakukan oleh KPU, sebagai penyelenggara Pemilu, maupun Pemerintah. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut. Sebagai pemilih, masyarakat mempunyai hak politik untuk menyalurkan aspirasinya melalui Pemilu. Menilik dari penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah bersama KPU perlu berupaya meningkatkan partisipasi pemilih guna keberlangsungan Pemilu yang baik dan demokratis.

A. Pendahuluan

Partisipasi pemilih dari setiap Pemilu terus mengalami penurunan seperti yang terjadi pada Pemilu 1999 hingga 2009 dimana terjadi penurunan partisipasi yang signifikan yaitu sebesar 21 persen. Pada Pemilu pertama di era reformasi, tahun 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,74 persen. Angka itu menurun pada Pemilu 2004 menjadi 84,07 persen. Pada Pemilu 2009, partisipasi terus merosot menjadi hanya 71 persen. Kondisi tersebut disampaikan Ketua KPU, Husni Kamil Manik yang menyatakan keprihatinannya atas penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu sejak era reformasi. Dari tiga Pemilu yang digelar, hanya Pemilu 1999 yang

tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Bila kecenderungan itu terus berlanjut, jumlah pemilih pada Pemilu 2014 diprediksi akan menurun sampai angka 17 persen menjadi 54 persen. Meskipun demikian, KPU memasang target partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 di angka 75 persen.

Senada dengan hal tersebut, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan, menyatakan bahwa penurunan tingkat partisipasi Pemilu tersebut berbahaya bagi kualitas demokrasi. Fenomena pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung dari 2010 sampai dengan 2013 dapat menggambarkan proyeksi partisipasi pemilih

^{*)} Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sendhik@gmail.com



dalam Pemilu selanjutnya. Hal ini dikarenakan fenomena turunnya partisipasi pemilih juga terjadi dalam Pilkada. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, pada Pilkada di tahun 2013 ini, tingkat partisipasi politik masyarakat berkisar antara 50 hingga 70 persen. Bahkan ada yang hanya 50 persen. Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi, juga menyatakan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada menjadi acuan untuk Pemilu 2014. Pada beberapa Pilkada di Banten partisipasi masyarakat relatif rendah, dan itu harus dijadikan acuan untuk Pemilu 2014 nanti.

Penurunan tingkat partisipasi pemilih tersebut menjadi sebuah persoalan tersendiri di tengah banyaknya persoalan terkait Pemilu. Partisipasi masyarakat seolah dikesampingkan dengan persoalan lain seperti kampanye, DPT, tumpang tindih peraturan Pemilu, dan sebagainya. Padahal, partisipasi pemilih penting karena tanpa adanya pemilih, maka Pemilu tidak akan terselenggara. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus bekerja keras untuk menaikkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 yang akan datang.

B. Penurunan Tingkat Partisipasi Pemilih

Pemerintah khawatir angka partisipasi pemilih di Pemilu 2014 mendatang masih rendah. Ini berkaca pada pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) di sejumlah provinsi, di mana angka partisipasi pemilih turun drastis. Pilgub Sumut 2013 misalnya, angka partisipasi hanya 48,5 persen. Dengan demikian, angka tidak memilih (golongan putih-golput) mencapai 51,5 persen. Ini merupakan angka golput tertinggi dibanding dengan Pilgub di sejumlah provinsi lain. Contoh lain Pilgub Jateng, yang angka partisipasi pemilihnya 52 persen, dan Pilgub di Papua, yang mencapai 70 persen angka partisipasi pemilihnya.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan 1–12 Februari 2012, dari 2.050 responden yang diteliti dengan metode acak bertingkat, tercatat lebih 50 persen responden berpotensi tidak akan memilih pada Pemilu 2014. Sementara itu, pengamat politik dari *Sugeng Sarjadi Syndicate* (SSS), Toto Sugiarto, memperkirakan tingkat partisipasi politik masyarakat di Pemilu 2014

hanya 60 persen. Jika tidak ada perubahan, partisipasi publik di 2014 akan rendah dibandingkan 2009 yaitu 70 persen, dan 2004 dengan persentase 80 persen.

Beberapa penyebab partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu yang rendah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses Pemilu yang rumit dan sering berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu;
2. Perilaku elit politik yang akhir-akhir ini banyak terjerat dengan kasus korupsi, malas hadir dalam rapat, dan kunjungan kerja ke luar negeri yang menghabiskan uang negara tanpa ada transparansi;
3. Rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu (KPU) sekarang ini;
4. Gagalnya partai politik membangun basis pendukung yang kuat di masyarakat, sistem rekrutmen partai yang kacau, pengambilan bakal calon legislatif yang terkesan tidak serius dan tidak berkualitas;
5. Pandangan apatis di kalangan masyarakat, bahwa suara yang diberikan saat Pemilu tidak terlalu berpengaruh bagi nasib mereka.

Berbagai penyebab tersebut menyebabkan mereka lebih memilih bekerja daripada ke tempat pemungutan suara, karena merasa tidak ada perubahan yang luar biasa yang membuat keadaan jauh lebih baik.

Fenomena penurunan partisipasi pemilih tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah bersama jajaran KPU diharapkan terus berbenah diri untuk memperbaiki kinerjanya.

C. Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih

Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, penyelenggara Pemilu harus melakukan berbagai pendekatan. Dia mengusulkan dilakukan pendekatan keagamaan. Pemilih harus diberikan pemahaman bahwa Pemilu adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan kedaulatan, sebagai sarana penting dalam mewujudkan keadilan. Pemilu dengan demikian menjadi bagian dari kewajiban agama. Pemilu menjadi wajib karena

tanpa proses Pemilu, kedaulatan dan penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat tidak akan terwujud. Dia berharap, partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 nanti semakin meningkat. Ketika pemilih datang ke TPS melakukan pencoblosan pada 9 April nanti, yang tadinya hanya kewajiban kolektif dapat menjadi kewajiban pribadi karena diniatkan untuk menegakkan keadilan dan tidak dapat ditinggalkan.

Namun demikian, gagasan ini masih harus dipertimbangkan secara matang. Jika memakai pendekatan agama, tentu harus melibatkan tokoh agama agar didengar oleh para pengikutnya. Selain itu, pemilih harus didorong supaya tetap jujur. Kewajiban datang ke TPS dan memilih harus juga dibarengi dengan pemahaman pelaksanaan Pemilu yang terkadang dihadapkan pada kecurangan, pelanggaran dan manipulasi suara dalam pelaksanaan.

Menurut Komisioner KPU, Arief Budiman, KPU akan berusaha keras mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2014 nanti. Ada beberapa cara yang sudah dipersiapkan untuk mengajak pemilih. KPU sudah membentuk Relawan Demokrasi untuk menyosialisasikan Pemilu. Relawan tersebut akan menyebar sampai ke daerah-daerah supaya masyarakat memahami mengenai pentingnya Pemilu. Jika masyarakat paham maka diharapkan masyarakat akan peduli dan berpartisipasi dalam Pemilu. Relawan Demokrasi tersebut direkrut pihak kabupaten dan provinsi, namun akan digerakkan dari KPU pusat supaya lebih maksimal.

Mendagri Gamawan Fauzi meminta semua pemangku kepentingan Pemilu ikut mendorong partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014. Kemendagri akan membantu menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu bersama dengan aparat penyelenggara Pemilu, terutama KPU, untuk memberikan partisipasinya, misalnya sosialisasi untuk memberikan dukungan di tingkat nasional. Pemerintah daerah (Pemda) juga diminta mengalokasikan anggaran untuk mendukung Pemilu yaitu untuk mengatur, misalnya anggaran, dan memberikan dukungan apa saja yang dapat diberikan oleh Pemda.

Menurutnya, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk sosialisasi Pemilu dapat disalurkan untuk produksi spanduk, baliho, atau *banner*. Namun demikian, peran itu harus dilakukan melalui koordinasi dengan KPU setempat. Hal ini agar tidak terjadi anggapan pemerintah pusat mengintervensi sehingga koordinasi dan sinkronisasi sangat diperlukan untuk sinergi antara Pemda dan penyelenggara Pemilu.

TNI dan Polri juga harus dilibatkan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelibatan itu dalam hal pengamanan kampanye, pendistribusian, dan pengamanan perlengkapan suara. Selain itu, sebanyak 38 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2014.

Penurunan partisipasi politik masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu belakangan ini memberikan anggapan rendahnya pembelajaran demokrasi di masyarakat. Hal ini tentu saja melibatkan banyak pihak yang berperan di dalamnya terutama partai politik (Parpol). Menurut Ahmad Bakir Ihsan, Parpol harus mendorong peningkatan partisipasi politik pada masyarakat. Hal ini diartikan bahwa Parpol perlu memperbaiki citra mereka yang cenderung negatif. Masyarakat tidak merasakan kehadiran partai, karena partai hanya sibuk pada Pilkada atau menjelang Pemilu saja. Selain itu, banyak partai tidak mampu membangun kepercayaan publik. Misalnya partai Islam yang harusnya memiliki ikatan emosional keagamaan nyatanya hanya dapat jadi partai menengah saja, yang berarti bahwa partai politik gagal membangun kepercayaan mereka.

Sementara itu, Ketua Umum Gerindra, Suhardi berpendapat bahwa tujuan Pemilu atau politik adalah mengubah nasib suatu bangsa. Jadi kalau ada orang yang apatis bahkan tidak mau berpartisipasi, artinya mereka tidak mau mengubah nasibnya. Banyak keputusan yang keluar dari DPR dan mempengaruhi nasib masyarakat Indonesia. Maka masyarakat harus benar-benar selektif memilih wakilnya dan presidennya. Suhardi mengakui akan banyaknya kecurangan yang terjadi pada Pemilu yang lalu menyebabkan masyarakat

perlu ikut serta melakukan pengawasan. Terkait ancaman meningkatnya golput, lebih lanjut dikatakan bahwa itu adalah tindakan yang tidak benar dan dilarang agama. Golput itu mendekati haram karena tidak peduli dan berusaha mengubah nasib ke arah kehidupan yang lebih baik.

D. Penutup

Untuk mengembalikan partisipasi publik pada Pemilu 2014 Parpol maupun KPU sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan terus menyosialisasikan pentingnya Pemilu melalui media massa baik itu media cetak maupun elektronik. Tugas KPU saat ini adalah mengembalikan kepercayaan publik untuk ikut menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2014 mendatang. Meskipun di dalam Undang-Undang tidak ada aturan yang mengatakan partisipasi rendah menjadikan Pemilu tidak sah, namun partisipasi publik sangat penting, sebab Pemilu merupakan fase terpenting dalam kehidupan sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Semoga dengan waktu yang masih tersisa, KPU dengan segala upayanya mampu terus meningkatkan partisipasi publik untuk ikut menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Dengan demikian selain meningkatkan citra KPU di mata publik, diharapkan Pemilu 2014 dapat menghasilkan wakil rakyat maupun pemimpin yang berkualitas demi kemajuan bangsa dan negara.

Begitu juga dengan Parpol, seharusnya lebih selektif dalam memilih kader untuk calon legislatif yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Seleksi untuk bakal calon legislatif sebaiknya lebih diperketat agar Parpol dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang akan mereka pilih nanti. Selain itu, sinkronisasi antara Pemda dan penyelenggara Pemilu (KPU) sangat perlu dilakukan. Hal ini telah dilakukan Kemendagri antara lain dengan menyelenggarakan Rakornas dalam rangka Persiapan Pemilu 2014 yang diikuti oleh peserta dari seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu, antara lain dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian. Rakornas tersebut digelar untuk menyamakan persepsi dan sinergitas antarlembaga pemangku kepentingan

Pemilu. Harapannya adalah partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam Pemilu 2014, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Rujukan:

1. "Tingkatkan Pemilih KPU Disarankan Lakukan Pendekatan Agama," <http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/20/12/785387>, diakses 20 September 2013.
2. "Tingkatkan Partisipasi Pemilih KPU Bentuk Relawan Demokrasi," <http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/20/12/785479>, diakses 20 September 2013.
3. "Pemerintah Bantu Sosialisasi Partisipasi Pemilu," <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/26/1506380>, diakses 20 September 2013.
4. "Tingkat Partisipasi Pilkada Jadi Acuan Pemilu 2014," <http://www.antarane.ws.com/berita/396126>, diakses 20 September 2013.
5. "Mendagri Minta Kominda Berperan Meminimalisir Angka Golput," <http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/09/12/781082>, diakses 20 September 2013.
6. "Partisipasi Politik Pemilu 2014 Hanya 60%," <http://www.suarapembaruan.com>, diakses 20 September 2013.
7. "Bahaya, Partisipasi Rakyat Dalam Pemilu Terus Menurun," <http://www.rmol.co/read/2013/07/05/117325/1>, diakses 20 September 2013.
8. "Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Pemilu 2014," <http://id.voi.co.id/voi-komentar/4281>, diakses 20 September 2013.
9. "Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2014 Diperkirakan Rendah," <http://www.antarakalbar.com/berita/316169>, diakses 20 September 2013.
10. "Angka Golput Pilgub Tinggi, Pusat Cemaskan Pemilu 2014," <http://www.jpnn.com/read/2013/08/30/188446>, diakses 20 September 2013.
11. "38 Perguruan Tinggi Akan Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilu," <http://www.beritasatu.com/politik/139715>, diakses 23 September 2013.